

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang dilakukan di bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan Perumahan Grand Candi Residence terbukti melanggar Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Timur Tahun 2021-2040. Pasal yang dilanggar dalam kasus tersebut yaitu pasal 137 ayat (3) huruf b mengenai ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta proses perizinan pemanfaatan ruang untuk kepentingan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Hal ini juga diperkuat dengan hilang atau tidak terdapatnya papan peringatan pencegahan pembangunan perumahan tersebut serta pembangunan perumahan tersebut terletak persis di area Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang dilakukan di bab sebelumnya, penulis menyarankan:

Masyarakat harus memastikan bahwa pihak developer sudah mengantongi izin dalam membangun perumahan sehingga tidak terjadi masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan

perumahan serta menyarankan pihak *developer* harus mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pembangunan perumahan.



DAFTAR PUSTAKA

buku :

- Abdurahman., 1978, *Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Adi Sasono dan Ali Sofyan Husein, 1995, *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Arba, 2017, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah : Prinsip – prinsip Hukum Perencanaan Ruang Dan Penatagunaan Tanah*, Sinar Grafika Offset, Jakarta Timur.
- Bambang Sugono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Budi Supriyanto, 1996, *Tata Ruang dalam Pembangunan Nasional*, Board of Science Development Strategis, Jakarta.
- Hasni, *Hukum Penaataan Ruang dan Penatagunaan Tanah (Rajawali 2008)*. [70].
- I Wayan Suandra, 1991, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta;
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, 2016, *Hukum Tata Ruang*, Nuasa, Bandung.
- Moleong Lexy J, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Siswono Yudohusodo, 1991, *Rumah Susun Untuk Seluruh Rakyat*, Bharakerta, Jakarta.
- Tatiek Sri Djatmiati, et.al., *Buku Ajar Hukum Perizinan (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2012)*. [12]
- Urip Santoso (I), *Hukum Penataan Ruang (Airlangga University Press 2012)*. [1].
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria : kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta.
- Urip Santoso, 2014, *Hukum Perumahan*, Kencana, Jakarta.

JURNAL :

Indayanti Lanya & N Netera Subadiyasa, 2012, Jurnal Kajian Bali, *Penataan Ruang Dan Permasalahannya Di Provinsi Bali*, Volume 2, 163-184.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, (Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha) Juli 2018.[9].

Nazly, Hidayanti, Dkk, 2020, Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan, *Dampak Dinamika Kependudukan Terhadap Lingkungan*, Volume 2, Halaman 33-42.

Surya Dini Hastuti, "Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Lokasi Dalam Rangka Perolehan Tanah Yang Diperlukan Usaha", 2020, Vol. 3 No. 3 Jurisdiction.

SKRIPSI :

Andriyanto, Benny, 2019, *Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Menjadi Tempat Tinggal Menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Budi, Febriana, 2013, *Permasalahan Perumahan Dan Alternatif Solusinya Di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*. Diploma Iv, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.

Prakoso, Margareth Tutut M, 2020, *Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Pembangunan Apartement Student Castle Di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Siswanto, Siswanto, 2018, *Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Tempat Tinggal Di Kabupaten Grobogan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

PERUNDANGAN :

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria. Lembaran Negara Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1085. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Timur Tahun 2021-2040. Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 3. Sekretariat Daerah. Sleman.

INTERNET :

Abdul Hamied Razak, Langgar Tata Ruang, 2 Perumahan di Sleman Harus Hentikan Pembangunan,

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/12/16/512/109101/8/langgar-tata-ruang-2-perumahan-di-sleman-harus-hentikan-pembangunan>, diakses pada 17/03/2022.

<https://www.bpkp.go.id/diy/konten/830/Profil-Kabupaten-Sleman#:~:text=Kabupaten%20Sleman%20keadaan%20tanahnya%20dibagian,sekitar%20100%20sumber%20mata%20air>, diakses pada 02/12/2022

<https://www.daratan.co/property/grand-candi-residence/>
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://nasional.tempo.co/amp/698473/butuh-9-tahun-mendata-tanah-milik-keraton-yogyakarta&ved=2ahUKEwidxrTTnNr7AhV3T2wGHQJ1D4QQFnoEC_AgQBQ&usg=AOvVaw2pohZETgyL2W3qpM0LIRak, diakses pada 02/12/2022

<http://www.slemankab.go.id/profil-bupati-dan-wakil-bupati-sleman-periode-2021-2026>, diakses pada 02/12/2022

Suhaiela Bahfein, Sanksi Pidana, Pilihan Terakhir Hukuman Pelanggar Tata Ruang, <https://www.kompas.com/properti/read/2021/03/04/130000521/sanksi-pidana-pilihan-terakhir-hukuman-pelanggar-tata-ruang?page=all#:~:text=Sanksi%20administratif%20ini%20berupa%20peringatan,administratif%20untuk%20pelanggaran%20tata%20ruang>, diakses pada 28/09/2022.

<https://tamanmartanisid.slemankab.go.id/first/artikel/3#:~:text=Kalurahan%20Tamanmartani%20terletak%20di%20wilayah,48%20RW%2C%20dan%20127%20RT>, diakses pada 02/12/22

<https://text-id.123dok.com/document/wyewx20y7-asas-tujuan-dan-ruang-lingkup-perumahan-dan-kawasan-permukiman.html>, diakses pada 28/11/2022.

